



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Komodifikasi Nilai Kesakralan (Transformasi Fungsi Ruang Dalam Perspektif Heterotopia di Pura Dalem Ped)

Nyoman Ayu Sukma Pramestisari*, Ni Luh Nyoman Kebayatini dan Kadek Aryana Dwi Putra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar-Indonesia

*Email: ayusukma@unud.ac.id

How to Cite: Pramestisari, N. A. S., Kebayatini, N. L. M., & Putra, K. A. D. (2023). Komodifikasi Nilai Kesakralan (Transformasi Fungsi Ruang Dalam Perspektif Heterotopia di Pura Dalem Ped). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (1): 59-75. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.59-75>

Abstract

The development agenda to improve people's welfare is still the dominant discourse. In the case of the Province of Bali, since the early 1980s the development of the tourism industry with the cultural tourism axis has been the main spirit of development. One of the logical consequences of this development agenda is the commodification of sacred spaces. The commodification of sacred spaces can be seen from the social reality at Dalem Ped Temple. Where now Dalem Ped Temple is not limited to being a sacred space for a place of worship for the Hindu community, but has developed into a tourism space to a capital accumulation space for local managers and traders. Various social spaces created as a result of the commodification of sacred values in Dalem Ped Temple are referred to as heterotopia spaces. In other words, an alternative space is created in a multifunctional space that is in one place.

Keywords: *Commodification; dalem ped temple; heterotopia*

Abstrak

Agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga kini masih menjadi wacana dominan. Dalam kasus Provinsi Bali, sejak awal 1980 pengembangan industri pariwisata dengan sumbu pariwisata budaya menjadi roh utama pembangunan. Salah satu konsekuensi logis dari agenda pembangunan ini ialah komodifikasi ruang kesakralan. Komodifikasi ruang kesakralan dapat dilihat dari realitas sosial di Pura Dalem Ped. Dimana kini Pura Dalem Ped tidak sebatas menjadi ruang sakral untuk tempat beribadah bagi masyarakat Hindu, tetapi berkembang menjadi ruang wisata hingga ruang akumulasi kapital bagi pengelola dan pedagang sekitar. Berbagai ruang sosial yang tercipta akibat komodifikasi nilai kesakralan di Pura Dalem Ped disebut sebagai ruang heterotopia. Dengan kata lain, tercipta sebuah ruang alternatif yang berada dalam ruang multifungsi yang berada pada satu lokasi tempat (place).

Kata kunci: Komodifikasi; pura dalem ped; heterotopia

I. PENDAHULUAN

Menyoal soal ruang dalam kacamata sosial menjadi menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan terkait ruang sosial bersifat dinamis seiring perkembangan zaman. Artinya, ruang secara sosial dipengaruhi oleh dinamika masyarakat yang memiliki interseksi dengan bermacam aspek seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya (Setiawan, 2017). Maka dari itu, memahami ruang sosial menjadi sangat unik dan tidak dapat mengeneralisasi sebab harus dipahami secara kontekstual sehingga dapat jadi berbeda-beda antar masyarakat.

Produksi ruang sosial dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan pada dimensi ekonomi. Bentuk konkret dari ekspansi esensi ruang ialah komodifikasi ruang. Ruang dalam konteks ini tidak dibatasi sebagai tempat spasial semata, melainkan ranah atau arena suatu dinamika sosial terjadi (Foucault, 2017). Komodifikasi ruang dalam konteks budaya Indonesia sangat mengarah pada sebuah ruang sosial yang dipenuhi oleh aktivitas kebudayaan dengan ciri khas tertentu. Hal ini dikarenakan ruang yang memuat tradisi dan aktivitas sosial tradisional dimanfaatkan oleh para pegiat bisnis untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan dalih pariwisata berbasis budaya.

Menjual tiket masuk atau penggunaan atribut keagamaan yang mengharuskan kita membayar uang sewa merupakan bentuk nyata ruang dan budaya menjadi

komoditas. Selain itu, implikasi pada ranah perekonomian seperti parkir, bisnis makanan, bisnis penginapan, dan bisnis transportasi turut merebak di lingkungan sekitar. Kondisi semacam ini dapat kita pahami sebagai proses komodifikasi dengan berasal dari kata komoditas dan modifikasi.

Komoditas sesungguhnya merujuk pada segala sesuatu yang dijual, tak terkecuali kebudayaan. Sedangkan modifikasi bermakna mengubah. Sehingga komodifikasi dapat dipahami sebagai pengubahan sebuah benda untuk memiliki nilai jual. Shepherd (2022) dengan tegas melayangkan argumen bahwa sejalan dengan signifikansi permintaan wisata, komodifikasi budaya tidak dapat dihindarkan sebab wisatawan ingin merasakan pengalaman berbudaya yang berbeda dari tempat asal mereka.

Meskipun harus diakui bahwa komodifikasi kebudayaan melahirkan segenap implikasi positif, di lain sisi terdapat sebuah ironi bahwa kebudayaan lokal ialah contoh utama yang rentan akan dampak negatif komodifikasi. Cohen (1998) menegaskan pakaian adat, ritual, festival, seni rakyat, dan tempat ibadah menjadi bagian dari komoditas pariwisata, sebagaimana mereka dipentaskan dan diproduksi hanya untuk konsumsi pariwisata. Pada tataran tertentu, dengan sengaja kebudayaan lokal akan diubah dan diperlakukan sebagai atraksi wisata semata sehingga bermuara pada kehancuran akibat kehilangan nilai filosofisnya. Bagi

Greenwood, kehilangan makna akibat komodifikasi budaya pada perkembangan pariwisata tak terkendali adalah permasalahan krusial.

Dalam konteks Asia Tenggara, laporan World Travel Tourism Council (WTTC) pada tahun 2013 menunjukkan negara anggota ASEAN mendapatkan devisa lebih dari US \$ 112 miliar. Kekayaan dan keanekaragaman budaya menjadi pondasi utama tembusnya angka devisa tersebut. Kebahagiaan pertumbuhan perekonomian mendapat respon positif, tetapi terdapat beberapa fakta lapangan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Fakta di Thailand menunjukkan perkembangan signifikan atas industri pariwisata hingga memberikan sumbangsih hingga 10% untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara. Komodifikasi terletak pada rumah-rumah tradisional yang disewakan kepada wisatawan untuk menjual pengalaman hidup sebagai warga lokal. Selain itu komodifikasi budaya juga terjadi di Vietnam. Di mana, komodifikasi terjadi pada budaya *Mua Roi Nuoc* yaitu seni pertunjukan yang menghubungkan aspek penting dari agama dan spiritualitas diwujudkan dalam cerita rakyat.

Proses komodifikasi pada *mua Roi Nuoc* terletak tatkala terjadi perubahan dari segi isi dan format agar menarik penonton khususnya wisatawan mancanegara. Seperti halnya, digabungkannya topik menarik layaknya percintaan dan penyingkatan durasi pertunjukan agar jumlah pertunjukan dalam sehari dapat maksimal.

Hal ini tentu membawa kritik pada muara hilangnya nilai pertunjukan ritual yang terkait dengan spiritualitas pedesaan Vietnam.

Dalam konteks Indonesia, salah satu daerah dengan keunikan dan kekhasan bangunan ruang sosial sekaligus menjadi destinasi wisata bertaraf internasional adalah Provinsi Bali. Keunikan tersebut secara garis besar bertumpu pada bagaimana masyarakat Bali tetap mempertahankan berbagai budaya termasuk ritus keagamaan di tengah dentuman globalisasi era kontemporer. Terlebih ketika penetapan UU Kepariwisata No. 9 Tahun 1990, dimana Bali menjadi daerah pengembangan industri pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah dan pusat. Sejak saat itu, pengelolaan pariwisata atas berbagai ruang semakin terorganisasi dengan baik, baik dari segi alam maupun sosial.

Wisata alam maupun budaya nampak berkembang sejalan dengan pangsa pasar masing-masing. Destinasi wisata alam populer misalnya Alas Kedaton, Jatiluwih, Bedugul, Gunung Agung, Danau Batur, Pantai Pandawa dan Pantai Lovina. Sedangkan destinasi budaya seringkali meliputi budaya seni seperti Tari Kecak, Tari Pendet, Drama Tari, *Joged* dan Gong Kebyar serta meliputi ritus keagamaan seperti ritual *Ngaben*, *Mesangih* dan Piodalan khususnya di beberapa pura yang memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat Hindu-Bali. Bahkan tidak jarang sebuah destinasi wisata menyuguhkan kedua aspek yaitu alam dan budaya sekaligus seperti Pura Tanah Lot,

Pura Ulun Danu Batur dan Pura Dalem Ped.

Secara konkret implikasi positif terkait eksistensi industri pariwisata disamping pengenalan budaya tradisional Bali dalam ranah internasional, tentu mempengaruhi roda perekonomian lokal maupun nasional. Meskipun begitu, berbagai kajian masih menunjukkan berbagai implikasi negatif. Dua realitas yang masih relevan hingga hari ini ialah pertama tergesernya masyarakat lokal sebab penguasaan modal oleh para kapitalis. Kedua, desakralisasi kebudayaan sebagai upaya pemenuhan atas permintaan pasar sehingga terjadi transformasi budaya baik berupa ritus maupun kesenian yang sebelumnya diyakini memiliki kekuatan sebagai penghubung antar dimensi yang berbeda kini menjadi komoditas (Raharjo, Munandar, & Zuhdi, 1998). Realita ini menunjukkan terdapat tendensi penciptaan atas berbagai ruang baru akibat pengembangan industri pariwisata.

Bertolak dari kompleksitas permasalahan di atas, maka tulisan ini berupaya untuk mengkaji mengenai transformasi ruang khususnya Pura Dalem Ped sebagai ruang sakral dalam konteks industri pariwisata Bali hari ini. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana perubahan Pura Dalem Ped dalam perspektif Ruang Heterotopia. Pemikiran Foucault dalam tulisannya *Of Other Space* mengenai Ruang Heterotopia akan digunakan sebagai pisau analisis guna menghasilkan analisis yang bersifat mendalam serta kritis.

II. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka digunakan dalam kerangka tulisan ini. Creswell (2007), menyatakan bahwa metode kualitatif menjadi sebuah cara ilmiah yang dapat mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu dan/atau kelompok berdasarkan permasalahan sosial. Dengan metode kualitatif, tulisan ini dapat memenuhi kebutuhan atas pemahaman komprehensif meliputi perolehan data yang variatif dan melimpah.

Dilain sisi, tulisan ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder. Data sekunder meliputi seluruh literatur atau kajian terdahulu, baik berupa arsip dan dokumentasi yang memiliki relevansi kuat dengan tema tulisan ini. Literatur yang digunakan berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komodifikasi ruang kesakralan baik dalam lingkup lokalitas dan nasional, pembangunan, dan perkembangan industri pariwisata di Bali.

Paska data dikumpulkan, penulis menganalisis data dengan tiga tahapan. Pertama, data direduksi meliputi penyeleksian data dengan cara dipilih dan diabstraksi sesuai kebutuhan agar menjawab rumusan masalah. Kedua, paska direduksi data dinarasikan. Ketiga, berdasarkan data yang telah disajikan, penulis dapat menarik kesimpulan dengan melibatkan kemampuan penulis dalam memahami makna dan alur sebab akibat berdasarkan rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Trajektori Pura Dalem Ped

Pura Dalem Ped merupakan salah satu pura tertua di Bali. Pura ini berlokasi di Pulau Nusa Penida yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Terletak sekitar 50 meter di bagian selatan laut Selat Nusa, pura ini memiliki lima lokasi pura yang bersatu di satu areal yaitu Pura Segara, Pura Taman, Pura Ratu Gede Macaling, Palebaan Ratu Mas dan Bale Agung. Masing-masing pura memiliki aturan sendiri terkait kepercayaan manifestasi Tuhan dalam wujud dewa tertentu yang berstana serta *banten* atau sesajen yang dihaturkan.

Secara historis, asal usul dibangunnya Pura Dalem Ped memiliki beberapa versi. Kontestasi wacana ini hadir dari kalangan bangsawan Ksatria, *Balian* dan warga setempat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat akan cikal bakal serta nama pura, tetapi secara umum Pura Dalem Ped sama seperti pada pura pada umumnya sebagai tempat beribadah. Hanya saja sejarah tertulis maupun lisan selalu menekankan bagaimana kekuatan spiritual serta berbagai kesaktian di luar nalar dan bersifat jauh dari kata profan terus melekat pada pura ini (Wijaya, 2016). Contoh konkret misalnya bagaimana masyarakat Hindu Bali khususnya masyarakat Desa Adat Ped hingga kini tidak berani untuk melakukan renovasi terhadap bangunan lama, melainkan pemugaran dilakukan dengan membangun bangunan baru di sebelah bangunan utama. Di lain sisi, terdapat tiga *tapel* (topeng) sebagai representasi atas

keyakinan kesaktian penguasa Nusa di masanya dalam menyembuhkan dan memberikan pertolongan bagi umat. Terakhir kemegahan atas pura utama yaitu Penataran Ratu Gede Mecaling merekognisi atas kepercayaan akan kejayaan penguasa Nusa di jaman dahulu.

Realitas di atas menunjukkan pengaruh kuat Pura Dalem Ped bagi masyarakat Hindu Bali masih sangat kuat meski terdapat kesimpang siuran atas cikal bakal berdirinya pura. Bahkan, Pura Dalem Ped dianggap sebagai pura dengan nuansa paling mistis di Bali. Hal ini dikarenakan penghidupan wacana sakral terus disosialisasikan dan banyak dari masyarakat meyakini kekuatan supra natural di sana, bahkan tidak sedikit yang pernah membagi pengalaman supra natural mereka (Artini, 2017). Eksistensi spiritualitas tersebut tercermin ketika para *pemedek* atau umat yang datang untuk beribadah memiliki tujuan untuk memohon kesehatan, kemakmuran, kesembuhan, kekayaan hingga *taksu* atau kekuatan sebagai *balian*.

Keyakinan masyarakat atas nilai kesakralanan yang lahir sebagai pembauran kebudayaan dengan ajaran agama Hindu dalam wujud tempat ibadah yaitu Pura Dalem Ped dalam dinamikanya mengalami beberapa transformasi. Bila menengok wajah Pura Dalem Ped dewasa ini, nampak telah menjadi objek wisata spiritual terpopuler. Hal ini disebabkan berbagai bangunan wacana terkait sejarah historis keagungan serta kekuatan kuasa yang terkandung. Eksistensi Pura Dalem Ped

semakin meluas manakala dewasa ini sedang digencarkan pariwisata Nusa Penida, sehingga berimplikasi pada kunjungan wisatawan. Implikasi atas pengembangan industri pariwisata akhirnya mengakibatkan beberapa transformasi dalam fungsi pura.

Dahulu masyarakat khususnya Hindu-Bali datang ke Pura Dalem Ped hanya untuk melakukan “komunikasi” dengan Tuhan dalam keyakinan mereka. Berbeda dengan dulu, kini kesakralan atas pura dirasa telah sedikit berkurang sebab terdapat aktivitas wisata maupun pendukung wisata. Transformasi ini telah dirasakan sejak penetapan UU Kepariwisata No. 9 Tahun 1990, yang melahirkan maraknya komodifikasi budaya termasuk rumah ibadah. Dalam konteks Pura Dalem Ped, masyarakat Desa Ped secara signifikan merasakan kunjungan turis ke pura terjadi sejak tahun 2012. Turis dapat masuk ke kawasan pura serta menikmati panorama beserta merasakan nuansa berada di dalam ruang sakral. Wisata budaya dan spiritual ini dikelola di bawah naungan Desa Adat Ped. Meskipun belum ditetapkan sebagai objek wisata layaknya Pura Tanah Lot atau Pura Ulun Danu Batur, sosialisasi melalui berbagai media telah dilakukan dan nampak akan mengarah seperti itu melihat intensitas turis yang berkunjung.

Terbukanya aksesibilitas kunjungan dari setiap masyarakat tanpa terbatas atas identitas tertentu mengakibatkan Pura Dalem Ped kini nampak sebagai ruang publik. Turis juga dapat melihat aktivitas persembahyangan masyarakat Hindu-Bali

hingga membeli cendera mata yang berada di area pura bagian luar. Meskipun dapat melihat aktivitas persembahyangan, masyarakat setempat pengelola pura tetap mengatur bahwa turis hanya dapat melihat dari area luar saja. Hal ini menunjukkan pengembangan industri pariwisata mampu membuka ruang baru terutama dari segi ekonomi ditandai dengan bertumbuhnya usaha dagang dan jasa di area pura mulai dari makanan, minuman, cendera mata, toilet hingga parkir. Pertumbuhan ruang baru akibat dari pengembangan industri pariwisata inilah yang akan menjadi fokus pada analisis bahasan, sebab menjadi menarik untuk melihat bagaimana transformasi ruang di era kontemporer ketika terjadi komodifikasi tempat ibadah khususnya Pura Dalem Ped.

Heterotopia: Sebuah Konteks Sosial atas Pertemuan Sang Abstrak dan Sang Konkret

Menyoal ruang secara umum kerap dipisahkan menjadi dua yaitu ruang nyata (*place*) dan ruang abstrak (*space*). Ruang nyata merujuk pada *place* sebagai ruang dengan wujud dan kasat mata seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan kantor. Berbeda dengan ruang nyata, ruang abstrak merujuk pada ide atau gagasan yang dimiliki dan dapat saja berbeda disetiap individu atau masyarakat. Ruang sebagai *place* dapat memiliki fungsi lebih dari satu disebut sebagai ruang multifungsi (Foucault, 2017). Dilain sisi, ruang sebagai *place* dapat mengakomodasi lebih dari satu aktivitas tatkala bertentangan disebut sebagai ruang relatif. Ruang relatif yang ada dalam ruang multifungsi (*place*: satu) dapat

diartikan sebagai ruang heterotopia. Konsep ruang heterotopia merupakan gagasan milik Michel Foucault sebagai seorang tokoh post strukturalisme sebagai antitesis atas logika klasik dan modern bahwa ruang dapat dipisahkan menjadi ruang nyata dan tidak nyata.

Kontekstualisasi perspektif heterotopia dengan fenomena komodifikasi yang terjadi di Pura Dalem Ped berangkat dari bagaimana ruang dideskripsikan seperti kekuasaan yang tidak dapat didefinisikan secara tunggal, melainkan setiap orang berhak untuk menginterpretasikan ruang menurut mereka. Menolak dikotomi seperti pemikiran tokoh klasik hingga modern terutama Descartes antara ruang abstrak dan ruang nyata, bagi Foucault ruang dapat dikategorikan menjadi tiga (Monita, 2010). Setidaknya terdapat tiga ruang dalam gagasan Foucault yaitu utopia, distopia, dan heterotopia.

Pertama, ruang utopia merupakan ruang tidak nyata seperti ide atau gagasan. Kedua, ruang distopia yaitu ruang nyata berwujud tempat seperti rumah, rumah sakit dan tempat ibadah. Ketiga, ruang heterotopia sebagai ruang yang terbentuk oleh suatu masyarakat akibat terjadi pertemuan antara ruang utopia dan distopia. Heterotopia dapat pula dipahami sebagai ruang tidak nyata yang berada dalam ruang nyata. Perlu dipahami bahwa dimensi tidak nyata ini dapat bergeser sesuai aktivitas yang ada di dalamnya atau konteks sosial. Maka dari itu, ruang nyata bersifat relatif sebab karakter isi ruang dapat selalu berubah-ubah.

Secara spesifik Foucault memberikan tujuh prinsip ruang heterotopia (Foucault, 2017). Pertama, sebagai ruang dengan fungsi bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis. Kedua, ruang heterotopia memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial. Ketiga, heterotopia dapat menumpuk beberapa ruang tidak nyata tetapi di dalam satu tempat yang nyata. Keempat, ruang heterotopia terkait dengan waktu, dimana tidak saja merasakan apa yang ada saat ini tetapi di masa lampau bahkan masa depan.

Kelima, heterotopia selalu diasumsikan dengan sistem *opening-closing*. Artinya, ruang heterotopia terlihat nampak seperti ruang publik namun tidak jarang ruang tersebut menjadi ruang privat. Keenam, heterotopia dapat menciptakan ruang nyata yang lain. Ketujuh, heterotopia memiliki kontinum dimensi ruang dan waktu sehingga konteks ruang seringkali berubah seiring dengan perkembangan jaman. Dari ke-tujuh prinsip ruang heterotopia, tulisan ini akan menggunakan lima prinsip yang paling relevan dengan transformasi ruang Pura Dalem Ped.

Komodifikasi Budaya: Pendongkrak Industri Pariwisata

Konsep bagaimana industri pariwisata bekerja menjadi penting untuk dipahami ketika ingin menyoal komodifikasi kultur atas nilai kesakralan pada konteks ruang heterotopia. Industri pariwisata sesungguhnya merupakan anak dari globalisasi ekonomi tentang sebuah kehidupan ekonomi secara global dan

terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan satu sama lain. Konsekuensi logis dari prinsip kebebasan ialah kawasan perdagangan semakin luas dan menghilangkan segala hal yang dianggap sebagai hambatan guna peningkatan aktivitas perekonomian (Shepherd, 2002). Dalam hemat penulis, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa.

Kontekstualisasi di tengah masyarakat Indonesia secara general memperlihatkan linearitas pertumbuhan globalisasi ekonomi dengan perkembangan konsumsi budaya. Pertumbuhan itu membentuk transformasi kapitalisme yang ditandai dengan menjamurnya reproduksi dan transformasi gaya hidup (Budiman, 2002). Peran sentral media masa dalam upaya produksi dan reproduksi gaya hidup tidak dapat dianggap sepele.

Media massa membentuk pengetahuan tentang suatu realitas melalui strategi komunikasi agar mampu memelihara atau mengubah sikap dan pendapat sasaran demi kepentingan sumber pembuat strategi. Sehingga, media massa dapat dikatakan selalu memiliki upaya agar sasarannya menjadi "patuh" terhadap pihak yang menguasai modal, baik dalam konteks politik maupun ekonomi.

Diskursus media massa mengenai pengkonstruksian gaya hidup dalam rangka menyukseskan industri pariwisata ialah komodifikasi. Komodifikasi merujuk pada

transformasi barang atau layanan yang sebelumnya tidak memiliki nilai jual menjadi memiliki nilai jual (komoditi) (Budiman, 2002). Dengan kata lain, komodifikasi merupakan salah satu bentuk kapitalisme global mengakumulasi kapital, komodifikasi telah mentransformasi nilai guna menjadi nilai tukar yang sifatnya komersial.

Budaya menjadi satu dari sekian komoditi di era kontemporer. Produk-produk budaya berkontestasi untuk menyasar pangsa pasar dengan dalih pertumbuhan perekonomian. Hal ini secara langsung terdistribusi ke dalam relasi kehidupan masyarakat, termasuk eksistensi budaya tradisional yang dahulu identik dengan identitas kultural menjadi sebuah komoditi pasar.

Beberapa kajian menunjukkan contoh konkret. Salah satunya ialah kesenian tradisional yang secara trajektoris berfungsi sebagai ekspresi masyarakat untuk menciptakan keserasian antara manusia dan lingkungan kini dituntut bersaing dengan produk-produk budaya lain agar memiliki nilai jual. Kesenian telah menjadi benda budaya yang diproduksi oleh sebuah industri secara massal demi keuntungan finansial. Dalam karya Irianto (2016), kesenian tradisional mengalami perubahan dari awal mula sebagai subjek pengetahuan, kebijakan, dan kearifan lokal menjadi suatu objek materiil yang diperjualbelikan melalui proses produksi budaya. Proses ini menjadi titik tolak bagaimana komodifikasi budaya lahir dengan wujud transaksi perdagangan (jual-beli) benda budaya. Melalui proses

industri yang menuntut keuntungan secara finansial, eksistensi kesenian tradisional dikemas menjadi benda budaya yang harus mengikuti aturan pasar.

Perspektif komodifikasi budaya memiliki analisis serupa dengan penelitian Suryadana (2013). Penelitian dengan lanskap Bali memperlihatkan dominasi logika pasar dituding sebagai penanggungjawab atas perubahan lanskap Bali akibat pengembangan industri pariwisata. Jika dahulu wisatawan datang karena budaya Bali, kini Bali harus memiliki budaya sesuai keinginan pasar (Suryadana, 2013). Hal ini dikarenakan kejenuhan atas model pariwisata modern dalam bingkai konvensional, seperti kemacetan, café, dan hiburan malam yang menjadikan pergeseran hasrat akan konsumsi wisata yang dituju. Salah satu contohnya ialah tari tradisional yang dahulu dianggap sakral dan hanya dipentaskan pada momen tertentu, kini dapat dinikmati untuk kepentingan pariwisata.

Pengaturan sedemikian rupa menjadi lazim adanya ketika narasi kerap digiring pada kepentingan finansial sebagai sumbu utama hidup di era kontemporer. Pergeseran makna dan nilai filosofis seringkali terjadi dan mendobrak keyakinan lama. Melalui proses industrialisasi yang meletakkan akumulasi kapital sebagai sumbu utama, eksistensi budaya tradisional bermuara pada sebuah kemasan benda budaya yang harus mengikuti aturan pasar.

Meskipun demikian, perubahan ini setidaknya dapat dilihat dari dua

paradigma. Paradigma tersebut ialah keuntungan serta tantangan baru yang muncul akibat perubahan. Secara kritis tentu transformasi eksistensi kultur melahirkan dilema seperti kerusakan alam, pencemaran nilai seni budaya hingga lahir masyarakat marjinal. Kasus konkret ialah para seniman tradisional yang mendukung industri pariwisata di Bali harus naik truk dan menerima upah relatif rendah, meski mereka melakukan pertunjukan di hotel-hotel berbintang (Irianto, 2016).

Dengan menanggalkan nilai kesakralan oleh nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun, para pelaku kesenian tradisional diwajibkan melayani pesanan para pembeli. Desakan industri pariwisata dengan dalih modernitas, akhirnya mendekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap keberadaan budaya tradisional. Tidak semata direfleksikan sebagai identitas kultural yang memberikan ruang spiritual bagi masyarakat, melainkan dituntut menjadi komoditi hiburan dengan nilai komersil. Dengan demikian, eksistensi budaya tradisional pada ranah industri pariwisata dapat dipahami sebagai sebuah gambaran tentang benturan antara nilai tradisional yang mengabdikan pada harmoni, keselarasan, dan spiritual dengan nilai modern dengan titik tumpu pada sendi kapitalisme. Untuk itu maka penting agar industri pariwisata berdimensi lebih dari sekadar ekonomi, melainkan terintegrasi dengan lingkungan alam dan sosial masyarakat.

Paradigma kedua ialah keuntungan yang dapat diraih ketika dilakukan

komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian di sekitar masyarakat. Faktor utama dari terjadinya komodifikasi budaya ialah pengembangan kreativitas terutama untuk menggali potensi komersil. Hal ini akan menjadikan sebuah budaya memiliki nilai guna ekonomis. Di lain sisi, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk upaya melestarikan budaya dan sebagai ajang promosi budaya ke masyarakat luas (Agusta, dkk, 2017).

Fakta menarik lainnya ialah tidak selamanya komodifikasi berimplikasi negatif akibat perubahan yang dibawa. Agusta, dkk (2017) melalui studi Dampak Komodifikasi Terhadap Perubahan Identitas Tari Topeng Hitam melihat sisi lain dari proses komodifikasi. Memang betul, terdapat perubahan unsur dan nilai yang terkandung. Tetapi, hal itu justru memperkuat nilai historis dan memori kolektif para pelaku dan masyarakat sekitar (Agusta, Wardo, & Supana, 2017). Jika dilihat dari perspektif ini, tentu dampak positif dirasakan oleh masyarakat akibat perkembangan sektor pariwisata khususnya peningkatan taraf hidup akibat kesempatan meraup kapital jauh lebih besar.

Kedua paradigma di atas jika dikontekstualisasikan dengan tulisan ini menjadi sejalan. Meskipun konteks berbeda, di mana kajian terdahulu lebih menekankan pada aspek budaya kesenian dan tulisan ini menekankan pada ruang atau tempat ibadah, letak kesamaan ialah implikasi terhadap dunia sosialnya. Secara konkret komodifikasi Pura Dalem Ped melahirkan

tantangan yang sama sekali baru bagi masyarakat sekitar. Jika dahulu pura identik dengan nilai kesakralan, suci, dan tidak sembarang orang dapat masuk ke area tersebut, kini perubahan harus terjadi. Hal ini dapat dilihat dari Pura Dalem Ped kini menjadi salah satu daya tarik pariwisata bagi turis lokal hingga mancanegara.

Perolehan data lapangan menunjukkan para turis diperbolehkan untuk masuk dan melihat bagian dalam pura walaupun tidak bersembahyang. Meskipun begitu, aktivitas ini tetap dipantau dengan arti tidak seluruh arena pura dapat dikunjungi dan ditetapkan aturan berpakaian oleh pihak pengelola pura. Realita ini menunjukkan ruang tersebut telah menjadi komoditi atau produk budaya. Wisatawan dapat datang untuk melihat lokasi, arsitektur, dan tak jarang melihat ritual yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan pura itu. Selain di Pura Dalem Ped, kondisi serupa terjadi di beberapa tempat ibadah lain seperti Pura Batukaru, Pura Tanah Lot, Pura Besakih dan lain-lain.

Nilai kesakralan menjadi milik bersama namun dalam dimensi berbeda sebab relasi jual beli yang mendominasi. Meskipun begitu, rambu-rambu tetap ditegakkan dengan harapan tidak menodai nilai filosofis dari eksistensi budaya tersebut. Contoh konkret ialah para wisatawan tidak boleh sembarang masuk ke area pura, bagi wisatawan wanita tidak boleh masuk ke area pura ketika sedang datang bulan, wisatawan tidak boleh menggunakan pakaian minim ketika

memasuki area pura (menggunakan busana adat rapi yang sudah disediakan). Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif kegiatan pariwisata yang dapat merusak atau mencoreng nilai kesakralan dan kesucian di lokasi tersebut.

Paradigma terkait implikasi positif tercermin tatkala melihat komodifikasi Pura Dalem Ped memberikan angin segar bagi masyarakat sekitar. Roda perekonomian bergerak menuju laju tercepat dibandingkan sebelum daerah tersebut tersentuh industri pariwisata. Lapangan pekerjaan tersedia semakin meluas serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Adapun beberapa lapangan pekerjaan baru yang muncul paska Pura Dalem Ped menjadi destinasi pariwisata ialah pemandu wisata, bisnis sewa kendaraan, warung makan, penginapan, hingga peningkatan pendapatan bagi pengusaha tiket fast boat. Peningkatan pendapatan tiket fast boat dikarenakan lokasi Pura Dalem Ped berbeda pulau dengan Pulau Bali yaitu di Pulau Nusa Penida.

Dua paradigma di atas menguatkan bahwa proses komodifikasi budaya dapat dilihat dari berbagai sisi pada implementasinya. Meskipun masyarakat harus beradaptasi dengan kultur baru, hal ini menjadi konsekuensi logis sebuah kepentingan era kontemporer yaitu akumulasi kapital. Konsekuensi logis menjadi pilihan terbaik tatkala masyarakat ingin memperbaiki kehidupan perekonomian dengan terjun langsung ke lingkaran industri pariwisata.

Dilema Kebutuhan Ekonomi dan Pelestarian Budaya

Dikotomi antara kesakralan dan kepentingan ekonomi tentu diperlukan sebuah titik untuk menyeimbangkan. Nilai kesakralan suatu budaya lebih didominasi oleh nilai kearifan lokal, sedangkan ekonomi lebih menitikberatkan pada sisi komersial dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana agar implikasi positif dan negatif akibat komodifikasi ruang dan budaya dapat disikapi dengan bijak. Pengendalian kerusakan (*damage control*) dapat digunakan sebagai alternatif solusi agar kebudayaan tidak berubah penuh hanya sebagai *paid performance*, sehingga perlu dipisahkan antara budaya yang dianggap sakral dan budaya yang dapat dipromosikan kepada turis.

Di lain sisi, terdapat hal lain yang dapat dilakukan seperti pembatasan turis yang datang ke wilayah tersebut guna meminimalisasi terjadinya kerusakan nilai-nilai yang ada di tempat tersebut (Shepherd, 2002). Dengan adanya pembatasan jumlah, tentu akan memudahkan pengawasan terhadap aktivitas para pengunjung wisata. Meskipun bukan hal mudah, tetapi pemisah ini krusial untuk ada agar keselarasan dapat terjadi. Hasil kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, selama para pemain dunia pariwisata tidak gelap mata dan mengubah intisari kebudayaan demi kepentingan ekonomi semata.

Upaya pemisahan antara dua kutub, kebutuhan ekonomi dan pelestarian budaya telah nampak dari aktivitas wisatawan di Pura Dalem Ped. Beberapa area bahkan tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Pada hari-hari suci tertentu, jumlah wisatawan dibatasi bahkan dalam momen tertentu kegiatan pariwisata dihentikan. Selain itu, penggunaan atribut kebudayaan seperti kain bagi para wisatawan juga diterapkan guna memperjelas batas kesakralan dalam ruang yang telah terkomodifikasi.

Komodifikasi Kultur Atas Nilai Kesakralan: Membaca Pura Dalem Ped Dalam Nuansa Ruang Heterotopia

Transformasi ruang dalam Pura Dalem Ped menjadi menarik untuk dibahas terutama paska pengembangan industri pariwisata di kawasan Nusa Penida. Hal ini menjadi relevan ketika memahami fakta bahwa sektor pariwisata menjadi sektor utama pendapatan daerah didukung dengan hingga pada tahun 2018, 85% PAD berasal dari pariwisata (Arum, 2018). Fakta ini memperkuat bahwa sektor pariwisata merupakan sektor andalan yang menjanjikan dalam rangka peningkatan perekonomian. Hal ini tercermin secara konkret pada bagaimana Pura Dalem Ped sudah merujuk sebagai objek wisata spiritual dengan mengkomodifikasikan selain ruang fisik juga wacana “kesakralan” dan “kemistisan” yang ada di dalamnya.

Menjadi menarik ketika memahami terdapat relevansi yang signifikan antara transformasi ruang di Pura Dalem Ped

dengan teori heterotopia milik Foucault. Penulis merasa penting untuk menyatukan konsep utama bahwa Pura Dalem Ped sebagai sebuah tempat ialah ruang nyata atau ruang distopia dalam konsep Foucault. Sedangkan, Pura Dalem Ped sebagai ruang untuk menjembatani masyarakat Hindu Bali “berkomunikasi” dengan Tuhan merupakan ruang utopia. Ketika ruang utopia menyatu dengan ruang distopia yang tersimbolkan melalui berbagai aktivitas sosial maka disebut sebagai ruang heterotopia (Monita, 2010). Dalam konteks ini, ketika masyarakat Hindu Bali sedang melakukan ritual agama dan persembahyangan maka dapat dimaknai sebagai ruang heterotopia. Hal ini dikarenakan ritus keagamaan dan persembahyangan adalah bentuk dari aktivitas sosial atau konteks sosial yang sedang terjadi dalam sebuah ruang.

Seiring dengan perkembangan waktu termasuk intervensi signifikan dari industri pariwisata, kini Pura Dalem Ped tidak lagi memiliki fungsi sebatas ruang penghubung antara umat Hindu Bali dengan Tuhan. Menjadi menarik ketika Pura Dalem Ped saat ini telah menjadi ruang rekreasi atau tempat wisata yang terbuka untuk umum serta ruang untuk proses perekonomian. Perdagangan dalam ranah ini dapat dipahami menjadi dua hal yaitu berdagang secara konkret baik berupa barang dagang maupun jasa di lingkungan pura serta perdagangan kultur atau nilai kesakralan termasuk komodifikasi framing sejarah terkait wacana mistis serta kekuatan supra natural yang terdapat di pura tersebut untuk menarik para wisatawan. Dengan

kata lain, terdapat komodifikasi ruang sakral untuk kepentingan profan.

Transformasi perkembangan Pura Dalem Ped sebagai ruang distopia dalam pemetaan menunjukkan bahwa Pura Dalem Ped telah menjadi ruang relatif dalam ruang multifungsi, sehingga menjadikan timbulnya ruang heterotopia. Sejalan dengan pemikiran Foucault bahwa ketika terjadi perpaduan antara ruang utopia dan distopia maka muncul ruang heterotopia sebagai segala ruang yang menghubungkan segala ruang baik utopia dan distopia melalui relasi sosial yang sedang terjadi (Foucault, 2017). Artinya, ruang heterotopia dapat sesuai ataupun bertolak belakang dengan konsepsi utopia awal dari ruang sebagai place tersebut. Dalam bahasa sederhana, ketika masyarakat melakukan persembahyangan di Pura Dalem Ped sebagai ruang distopia maka disebut ruang heterotopia yang sejalan dengan ruang utopia yaitu sebagai ruang untuk menjembatani komunikasi umat dengan Tuhan. Dilain sisi, ketika terjadi transformasi ruang dengan penciptaan beberapa ruang baru terkhusus disebabkan oleh industri pariwisata sehingga terdapat aktivitas berwisata, usaha dagang dan jasa termasuk komodifikasi nilai kesakralan juga termasuk sebagai ruang heterotopia na mun tidak sejalan dengan ruang utopia inti dari eksistensi Pura Dalem Ped.

Pemetaan atas pondasi konsep ruang Foucault telah jelas seperti uraian paragraf di atas. Maka analisis selanjutnya meliputi kontekstualisasi prinsip-prinsip ruang heterotopia, khususnya yang digunakan

dalam analisis ini. *Pertama*, ruang heterotopia merupakan ruang bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis (Monita, 2010). Pada kasus Pura Dalem Ped masyarakat Hindu Bali yang datang dapat dipahami sedang membutuhkan “kekuatan” di luar konteks profan untuk menjalani permasalahan hidup yang dialaminya. Proses persembahyangan dengan keyakinan dapat berkomunikasi dan memohon pertolongan melalui kebesaran sang maha pencipta merupakan wujud atas krisis manusia dalam menjalani permasalahan kehidupan sehingga membutuhkan sebuah kekuatan *the big other*. Termasuk bagaimana realita komodifikasi nilai kesakralan demi profit bersifat profan menjadikan pura sebagai objek wisata memperlihatkan terdapat tendensi krisis dalam masyarakat sehingga membutuhkan ruang untuk mencari hiburan. Begitu pula dengan kemunculan berbagai usaha dagang dan jasa secara implisit merepresentasikan terdapat krisis khususnya dari segi ekonomi dalam masyarakat sehingga guna mengatasi krisis tersebut memanfaatkan industri pariwisata menjadi jawaban.

Kedua, ruang heterotopia memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial (Foucault, 2017). Foucault dalam karyanya ketika menganalogikan pergeseran fungsi dan pandangan atas kuburan pada konteks masyarakat barat menjadi relevan dengan transformasi ruang Pura Dalem Ped. Seperti pemaparan pada poin pertama, keberadaan pura sebagai ruang distopia dengan fungsi menjembatani kebutuhan masyarakat Hindu Bali berkomunikasi dengan *the big*

other sebagai ruang utopia masih eksis. Hanya saja terdapat perkembangan ruang akibat industri pariwisata menjadi tempat berwisata, ruang mendapatkan profit baik usaha dagang dan jasa maupun komodifikasi nilai kesakralan di dalamnya. Pergeseran ini menjadi poin penting manakala dapat dimaknai saat melihat aktivitas yang sedang berlangsung di ruang distopia, dengan kata lain pemaknaan terkait dengan konteks sosial.

Ketiga, heterotopia dapat menumpuk beberapa ruang tidak nyata di dalam satu ruang nyata (Foucault, 2017). Bertolak dari pemetaan awal Pura Dalem Ped sebagai *place* distopia memiliki fungsi menghubungkan masyarakat Hindu Bali berkomunikasi dengan Tuhan sebagai dimensi utopia, seiring dengan transformasi perkembangan ruang maka terdapat berbagai utopia baru yang merupakan wujud ide, gagasan atau pemikiran orang lain. Bagi lembaga adat setempat memiliki pandangan bahwa pura dapat dikomodifikasi dengan memanfaatkan nilai keunikan dan sejarah historisitas kemistisan yang melekat guna menarik para wisatawan sehingga menghasilkan profit. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa hingga kini masyarakat Hindu-Bali bahkan di luar Pulau Nusa Penida melakukan persembahyangan dengan keyakinan atas kekuatan supra natural yang demikian besar terdapat di Pura Dalem Ped.

Di lain sisi, para pedagang menjajakan barang dagang seperti makanan dan minuman serta usaha jasa seperti parkir dan toilet di area pura bagian luar melihat

bahwa pura merupakan area untuk akumulasi kapital demi menyambung kehidupan. Para pedagang merasakan bahwa pasang surut industri pariwisata berdampak signifikan dengan hasil penjualan mereka. Termasuk bagaimana *pemedek* datang untuk bersembahyang meyakini bahwa pura merupakan tempat sakral sedangkan wisatawan berkunjung untuk menghibur diri atau mengkonsumsi wisata spiritual yang telah dikemas tanpa meninggalkan dimensi natural. Keragaman ini merujuk pada berbagai ide, gagasan maupun pandangan terhadap fungsi ruang secara sosial sebagai ruang utopia di dalam satu ruang distopia.

Keempat, ruang heterotopia terkait dengan waktu. Analogi Foucault mengenai museum bahwa terdapat jembatan waktu melalui benda-benda bersejarah (Foucault, 2017) menjadi relevan dengan Pura Dalem Ped. Di dalam pura terdapat berbagai bentuk artefak dengan kandungan nilai-nilai bersejarah dan memiliki tendensi kuat untuk menggiring masyarakat ke masa lampau terkait kejadian yang membuat pura ini memiliki nuansa mistis dan sakral yang begitu kuat. Biasanya, pemandu wisata akan menjelaskan nilai dan makna dari artefak yang ada di dalam pura. Simbol ini misalnya adanya *tapel sakti* atau topeng dianggap memiliki kekuatan supra natural dianggap mampu menyembuhkan berbagai penyakit baik medis maupun non medis. Beberapa bangunan yang melambangkan kekuatan di masa lampau khususnya Penataran Ratu Gede Mecaling menjadi representasi kekuatan penguasa Nusa pada jamannya. Dua benda bersejarah ini

menjadi pengingat mengapa pura ini menjadi begitu sakral dan berpengaruh kuat terhadap masyarakat.

Kelima, heterotopia diasumsikan dengan sistem *opening-closing* (Monita, 2010). Relevansi prinsip ini dengan dinamika Pura Dalem Ped terletak ketika telah menjadi tempat wisata sehingga dapat diakses oleh setiap masyarakat tanpa batasan identitas. Apabila sebelum dikomersialisasikan, Pura Dalem Ped hanya dapat diakses oleh masyarakat Hindu Bali untuk kepentingan persembahyangan kini serupa sebagai ruang publik. Meskipun aksesibilitas merepresentasikan ruang publik, namun pada waktu tertentu area pura harus steril dari wisatawan. Khususnya di hari raya besar keagamaan yang ditentukan berdasarkan perhitungan kalender Bali yaitu *Budhha* (Rabu) *Cemeng Klawu*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat seolah-olah dapat mengakses pura yang sebelumnya ialah tempat private dan sakral untuk golongan identitas lalu dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan identitas tetapi pada hari tertentu hanya orang tertentu (Hindu-Bali) yang dapat mengakses ruang ini.

Pemaparan relevansi konsep ruang heterotopia Foucault di atas menunjukkan setidaknya terdapat tiga fungsi ruang distopia Pura Dalem Ped. Transformasi ruang ini secara konkret dipengaruhi oleh perkembangan industri pariwisata terutama gencarnya pemaparan Nusa Penida sebagai kawasan wisata. Adapun tiga fungsi ruang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi ruang sakral untuk beribadah, ruang untuk

berwisata dan berdagang. Dimana berdagang dikategorikan menjadi dua yaitu komersialisasi ruang sakral dan usaha dagang serta jasa. Maka dari itu, untuk menghasilkan analisis yang lebih holistik maka akan dipaparkan konteks sosial yang lebih rinci dari masing-masing klasifikasi ruang yang tercipta di Pura Dalem Ped.

Pertama, dalam fungsi sebagai ruang ibadah kegiatan di Pura Dalem Ped diperuntukkan kegiatan persembahyangan oleh umat Hindu Bali beraliran Dewa Siwa. Waktu kegiatan hampir setiap hari terutama pada hari besar *piodalan* yaitu *Buddha Cemeng Klawu*. Dimana ruang untuk kegiatan berada di empat bagian pura khususnya di bagian *jeroan* area pura khusus untuk sembahyang. Komunitas yang melakukan ialah masyarakat beragama Hindu aliran Siva dengan hubungan sosial pada komunitas bersifat hierarkis antara pemuka agama atau pemimpin ritus dan umat beragama. Hal ini menjadikan faktor keberlanjutan semakin kuat sebab telah membudaya dan tersosialisasi terus menerus.

Kedua, dalam fungsi sebagai ruang wisata kegiatan di Pura Dalem Ped diperuntukkan untuk wisata khususnya budaya dan spiritual. Wisatawan dapat berkunjung hampir setiap hari kecuali hari raya besar *piodalan* yaitu *Buddha Cemeng Klawu*. Pengelola pura memberikan akses bagi para turis untuk mengakses Pura Dalem Ped dan biasanya akan dipandu oleh pemandu wisata setempat. Hubungan sosial dalam ruang ini terletak semi hierarki, dimana pengelola sekaligus otoritas

dipegang oleh pengurus desa adat, pecalang sebagai pengaman teknis kemudian wisatawan, masyarakat yang menjalani usaha dagang maupun jasa. Kondisi ini akan masih terus berlangsung sebab telah terlembagakan sebagai destinasi wisata.

Ketiga, terdapat ruang perdagangan yang penulis bagi menjadi dua yaitu komodifikasi budaya dan usaha dagang barang dan jasa. Dalam konteks komodifikasi budaya kegiatan yang dilakukan ialah mengkomersialisasikan budaya atau nilai kesakralan atas pura secara implisit. Hal ini dilakukan selama wisatawan berkunjung dengan memanfaatkan ruang di seluruh area pura. Kendali atas pembentukan ruang ini ialah masyarakat desa adat Peed yang ditetapkan oleh pemerintah desa adat berdasarkan hasil konsensus. Hubungan sosial ini secara riil memiliki relasi hierarkis bersifat demokrasi yaitu konsensus masyarakat sehingga menghasilkan peraturan untuk mengorganisasi pariwisata budaya, lalu diatur oleh pemerintah desa adat. Realita ruang ini akan tetap langgeng mengingat pura ini telah menjadi destinasi wisata populer.

Di lain sisi, ruang usaha dagang dan jasa sebagai implikasi atas komodifikasi budaya. Masyarakat yang memperdagangkan barang dan jasa melakukan kegiatan hampir setiap hari di area pura paling luar atau bagian *Jaba*. Para pedagang notabena merupakan penduduk lokal setempat termasuk jasa parkir dan toilet dikelola oleh masyarakat setempat.

Terkait hubungan sosial terdapat hierarkis antara pengelola dan pelaku dagang. Pengelola dalam konteks ini ialah pemerintah desa adat yang memiliki otoritas penuh terhadap pengembangan pariwisata Pura Dalem Ped, selanjutnya di bawah peraturan dan pengawasan pihak desa adat terdapat para pedagang.

Kompleksitas pembahasan mengenai transformasi ruang dalam fenomena industrialisasi pariwisata di Pura Dalem Ped menunjukkan implikasi signifikan diberbagai aspek. Akibat komersialisasi budaya dan nilai kesakralan, Pura Dalem Ped sebagai ruang distopia dengan nilai kesakralan untuk menjembatani hubungan masyarakat Hindu Bali dengan *the big other* yang merupakan dimensi utopia menjadi mengalami pergeseran sekaligus perkembangan ruang. Ruang tersebut menjadi setidaknya menjadi tiga yaitu ruang ibadah, ruang untuk berwisata dan ruang untuk berdagang. Berbagai wujud ruang yang dapat dimaknai berdasarkan konteks sosial atau aktivitas sosial ini disebut ruang heterotopia.

IV. KESIMPULAN

Eksistensi dan dinamika di dalam Pura Dalem Ped menunjukkan keselarasan dengan gagasan Foucault mengenai ruang heterotopia. Dimana, terdapat ruang yang terbentuk dari ruang distopia dan ruang utopia serta dapat dipahami karena terdapat konteks sosial. Dengan kata lain, ruang sosial terbentuk berdasarkan adanya relasi sosial. Pura Dalem Ped sebagai ruang distopia dahulu sangat terkait dengan hal

sakral sebagai tempat beribadah tetapi kini telah berkembang menjadi ruang wisata, ruang akumulasi kapital bagi pengelola dan pedangang.

Meskipun begitu, esensi sebagai ruang beribadah tetap eksis, khususnya lebih terasa ketika pada hari raya besar tepatnya Buddha Cemeng Klawu sebab akan disterilkan dari para wisatawan. Berbagai ruang sosial yang tercipta dalam Pura Dalem Ped sebagai ruang nyata inilah yang disebut sebagai ruang heterotopia. Dengan kata lain, heterotopia dipahami sebagai ruang relatif yang berada dalam ruang multifungsi yangmana merupakan satu tempat (*place*).

Secara kritis dinamika terjadi akibat kemampuan menegosiasikan kepentingan ekonomi yang terwujud dalam komodifikasi budaya dan pelestarian nilai kesakralan. Seperti misalnya membatasi jumlah kunjungan wisatawan, melarang wisatawan masuk ke area dengan nilai kesakralan tinggi, melarang wisatawan yang sedang datang bulan, dan wajib menggunakan atribut budaya untuk menjaga sopan santun.

Di sisi lain, aktivitas pariwisata tetap berjalan di mana masyarakat dapat memanfaatkan kondisi pariwisata untuk meraup rejeki. Seperti sebagai penyedia layanan jasa atau barang, bahkan dapat mempekerjakan karyawan dalam usahanya. Dengan ditetapkannya metode ini maka dua kepentingan tersebut dapat berjalan pada waktu bersamaan tanpa merugikan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, T., Wardo, & Supana. (2017, Desember). Dampak Komodifikasi Terhadap Perubahan Identitas Tari Topeng Hitam. *Haluan Sastra Budaya*, 1(2), 210-221.
- Artini, N. K. (2017, Oktober 2). Eksistensi Pelinggih Gajah Mina di Pura Dalem Penataran Ped. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1.
- Arum, M. (2018). *Analisis Sub Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Bali*. Yogyakarta: SKRIPSI.
- Budiman, H. (2002). *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and Commoditization in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 15, 371-386.
- Foucault, M. (2017). Tentang Ruang-Ruang yang Lain (Atau Heterotopia) . *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya (penj. Anton Nocenanto)*, 1, 37-48.
- Monita, R. (2010). *Heterotopia Pada Ruang Keseharian Studi Kasus Plaza Indonesia*. Jakarta: SKRIPSI.
- Raharjo, S., Munandar, A., & Zuhdi, S. (1998). *Sejarah Kebudayaan Bali*. Jakarta: CV Eka Darma.
- Setiawan, A. (2017). Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan. 1-12.
- Shepherd, R. (2002). Commodification, Culture, and Tourism. 2(2), 183-201.
- Suryadana, L. (2013). *Sosiologi Pariwisata*. Bandung: Humaniora.
- Wijaya, I. K. (2016, Maret). Master Plan Penataan dan Pengembangan Pura Dalem Bias Muntig di Desa Pakraman Nyuh Kukuh, Dusun Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. *Warmadewa*.